



2019

KESESUAIAN KURIKULUM SMK

Dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja

KESESUAIAN KURIKULUM SMK
dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja:
Kompetensi Keahlian
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

KESESUAIAN KURIKULUM SMK

dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja:

Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

Tim Peneliti:

Dr. Subijanto, M.Ed.
Darmawan Sumantri, S.Si.
Dra. Asri Ika Dwi Martini
Yunita Murdiyaningrum, S.Pd.
Tatik Soroeida, SE

ISBN 978-602-0792-33-0

Penyunting:

Nur Berlian Venus Ali, MSE
Prof. Dr. Dendy Sugono, P.U.
Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd.

Tata Letak:

Joko Purnama
Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, menegaskan akan pentingnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter agar dapat memberikan sumbangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi keterampilan yang siap pakai yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

Salah satu amanat Inpres tersebut ialah menyelaraskan kurikulum di SMK dengan kebutuhan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DU/DI) sebagai bagian dari agenda utama Revitalisasi SMK.

Terkait dengan hal tersebut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018 melaksanakan penelitian tentang kesesuaian kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan masukan pada Direktorat terkait untuk perbaikan pelaksanaan kurikulum di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019
Kepala Pusat



Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Studi “Kesesuaian Kurikulum SMK dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja” merupakan kajian yang dilaksanakan berdasarkan salah satu dari enam tugas prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Selanjutnya, fokus kajian pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) didasarkan pada salah satu dari tiga bidang keahlian prioritas pengembangan Nawacita untuk pendidikan kejuruan dan vokasi, yaitu bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Pariwisata.

Dalam pelaksanaan studi, dilibatkan pula berbagai pihak yang berkompeten dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kementerian Tenaga Kerja, dan DU/DI, termasuk DU/DI mitra masing-masing sekolah sampel kajian ini. Untuk itu, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh para pihak tersebut, diucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pertanyaan Penelitian	11
D. Tujuan dan Sasaran	11
E. Lingkup Studi	12
F. Keluaran	12
G. Pengguna Hasil Penelitian	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	 15
A. Keselarasan SMK Terhadap Kebutuhan Pembangunan	 15
B. Kurikulum SMK	24
C. Kompetensi	54
D. Dunia Kerja	55
E. Kerangka Pikir Penelitian	57
 BAB III METODE PENELITIAN	 61
A. Pendekatan Penelitian	61
B. Variabel dan indikator	61
C. Prosedur	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Penyelarasan Kurikulum	65
B. Mekanisme Penyelarasan Kurikulum	78
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	81
A. Simpulan	81
B. Rekomendasi	83
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Kurikulum APHP	35
Tabel 2. Struktur Kurikulum Agroindustri.....	36
Tabel 3. Spektrum Keahlian SMK/MAK Program Keahlian APHP	40
Tabel 4. Deskripsi Jenjang KKNI.....	49
Tabel 5. Sekolah Sampel Studi.....	62
Tabel 6. Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian APHP	65
Tabel 7. Adopsi Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian APHP dan Agroindustri	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan per-Bulan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013	2
Gambar 2. Bagan kerangka berpikir	60

BAB I

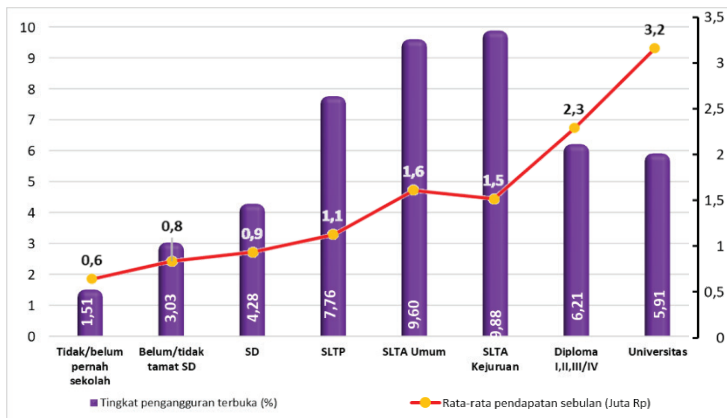
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sedang memprioritaskan penyiapan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Di bidang pendidikan sedang dilakukan berbagai kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi SMK dan politeknik. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia diharapkan dapat melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

Penyelenggaraan SMK bertujuan untuk menyiapkan peserta didik memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga siap memasuki dunia kerja. Di samping itu, siswa diarahkan agar mampu mengembangkan diri untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi serta berwiraswasta (PP No. 17/2010). Namun secara operasional, tujuan penyelenggaraan SMK lebih difokuskan pada kesiapan kerja di bidang tertentu. Berbagai upaya memperbaiki kualitas lulusan SMK terus ditingkatkan dan dikembangkan, namun tingkat keterserapan lulusan SMK oleh pasar kerja masih belum sesuai tujuan.

Data BPS (2013) menunjukkan bahwa lulusan SMK masih menduduki tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya.



Sumber: BPS.go.id

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan per-Bulan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013

Data di atas menunjukkan ketidakselarasan antara kualitas lulusan SMK dengan tuntutan dunia kerja merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan lulusan SMK di dunia kerja. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa lulusan SMK belum memenuhi harapan dunia kerja. Tingginya angka pengangguran lulusan SMK menunjukkan mutu pendidikan SMK kurang relevan dengan tuntutan dunia industri.

Lebih lanjut, data BPS (2014) menunjukkan kondisi tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2014 masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat SD yaitu sebanyak 45,66%. Sementara itu, tenaga kerja lulusan Sekolah menengah Pertama (SMP) sebesar 17,98%, tenaga kerja lulusan Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 16,86%, dan tenaga kerja lulusan SMK sebesar 9,73%. Selanjutnya, tenaga kerja yang

berasal dari lulusan Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3 hanya 2,58%, dan sisanya tenaga kerja berasal dari lulusan S1/D4 sebesar 7,19%. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia tersebut sekaligus menjustifikasi masih rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat Indonesia di berbagai sektor. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi warga negaranya.

Penyerapan tenaga kerja oleh industri secara kuantitatif masih belum sebanding dengan daya tampung industri per tahun. Secara umum, proporsi pencari kerja setiap tahun hampir didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Pada tahun 2013, pencari kerja dengan pendidikan tertinggi SMA mencapai 26% sedangkan SMK mencapai 17%. Sementara itu pada tahun 2014, SMA mencapai 27% dan SMK 18,4% (BPS, 2014). Salah satu masalah yang dihadapi yaitu adanya kesenjangan capaian kompetensi para lulusan institusi Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan riil DU/DI. Keadaan ini dapat diindikasikan sebagai rendahnya daya serap tenaga kerja lulusan SMK (Dit.PSMK, 2016a).

Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Kemendikbud untuk melakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan Kemendikbud harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven*. Presiden menambahkan, “Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi calon tenaga kerja yang terdidik dan terampil”. Salah satu cara untuk menghasilkan calon tenaga kerja yang berdaya saing dan kompeten yaitu

melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan DU/DI.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, diamanatkanlah kepada 11 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Presiden Jokowi memberikan enam instruksi. Keenam instruksi tersebut yaitu 1) membuat peta jalan SMK; 2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); 3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan DU/DI; 5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan 6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Kepada Kepala BNSP, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Kemudian 34 gubernur mendapat instruksi agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai

dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/09/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-tentang-revitalisasi-smk>).

Penyediaan SDM yang berkualitas dan terampil menjadi sebuah keniscayaan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Indonesia akan selamat dalam kancah globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) apabila memiliki SDM yang berkualitas, terampil, inovatif, dan kreatif, termasuk SDM dari lulusan pendidikan vokasi. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendi, 2016) menegaskan bahwa, “Kita memfokuskan pendidikan kejuruan yang berbasis kompetensi keahlian serta memiliki *link and macth* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha maupun industri. Hal ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha maupun industri, di samping tentunya untuk mengurangi angka pengangguran. Kita yakin, pendidikan vokasi di sekolah menengah mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri” (SMK Bisa Hebat, edisi ke-II 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 18 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu (Depdiknas, 2003). Implikasi UU tersebut terhadap tujuan penyelenggaraan SMK adalah menyiapkan peserta didik

untuk 1) memasuki lapangan kerja tertentu dan mengembangkan sikap profesional; 2) memiliki bekal dan kemampuan untuk memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri; 3) menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan/atau dapat mengisi kebutuhan dunia kerja pada saat ini maupun masa mendatang; 4) melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; dan 5) berwirausaha.

Tujuan SMK diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2010 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SMK bertujuan untuk menyiapkan peserta didik memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga siap memasuki dunia kerja. Di samping itu, siswa juga diharapkan mampu mengembangkan diri untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi serta berwirausaha. Dengan kata lain, lulusan SMK diharapkan dapat bekerja, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Namun, pola penyelenggaraan SMK di Indonesia belum beranjak dari *supply driven* ke *demand driven*. Hal ini dikarenakan jenis program keahlian, materi pendidikan, cara mengajar, media pembelajaran, evaluasi dan sertifikasi lebih dominan ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu, program pendidikan SMK tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja (Ace Suryadi, 2010).

Dengan demikian, SMK memiliki misi untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi sesuai paket keahlian masing-masing. SMK dikatakan berhasil jika para lulusannya dapat diserap oleh DU/DI sesuai dengan paket keahlian dan kompetensi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan (SMK) diperlukan untuk

memenuhi tuntutan pasar sekaligus untuk menghadapi era kompetisi global. Apalagi sejak tahun 2015, Indonesia telah menjadi anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di satu sisi, kehadiran MEA membuka peluang mobilitas keluar-masuk perdagangan bebas antarnegara anggota. Di sisi lain, persaingan tenaga kerja antarnegara anggota ASEAN semakin kompetitif.

Menyadari pentingnya pengembangan iptek dan kebutuhan tenaga kerja terampil, negara-negara kawasan ASEAN menempatkan pendidikan kejuruan sebagai salah satu sumber pendukung utama pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Proses integrasi ASEAN dan institusinya mendukung untuk saling berbagi pengetahuan, penyelarasan sistem pendidikan melalui negosiasi atas persamaan pengakuan dan membuka peluang bagi pasar tenaga kerja yang lebih terbuka. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijak dan sigap, mengingat hanya tenaga kerja yang berkualitas dan terampil yang akan mampu bertahan dan bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Untuk itu, sistem pendidikan vokasi SMK di Indonesia harus dapat mengembangkan berbagai strategi agar lulusannya berkualitas dan berketerampilan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada skala global (Kemenakertrans, 2016).

Dalam upaya peningkatan kualitas lulusan SMK, filosofi pendidikan kejuruan, “keterkaitan dan kesesuaian” (*link and match*) antara kompetensi dan kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan DU/DI menjadi permasalahan penting dalam kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Indonesia yang kemudian dibuktikan dengan adanya penetapan berbagai kebijakan, di antaranya merevitalisasi SMK melalui Instruksi Presiden

(Inpres) No. 9/2016. Di samping itu, semenjak tahun 2017, telah ditunjuk 125 SMK dengan bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian (ketahanan pangan), seni dan industri kreatif, serta 94 SMK bidang keahlian lainnya yang juga mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Menurut Mendikbud, pemilihan keempat program studi yang menjadi fokus pengembangan SMK tersebut berdasarkan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan menyerap sejumlah besar tenaga kerja. Oleh karena itu, program revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK percontohan meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DU/DI, inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program kerja sama industri, pengelolaan dan penataan lembaga, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Perbaikan dan penyelarasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (*link and match*) dengan DU/DI.

Namun, secara empirik kondisi SMK dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sebagaimana dikemukakan Slamet (2013) dalam penelitiannya tentang penyelenggaraan SMK, terlihat adanya kecenderungan 1) belum optimalnya keselarasan antara kompetensi lulusan dengan dunia kerja; 2) lemahnya SMK dalam menyiapkan lulusannya untuk menjadi wirausahawan; 3) belum mampunya SMK memberikan jaminan terhadap lulusannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak; 4) lambatnya daya tanggap SMK terhadap dinamika tuntutan

pembangunan ekonomi; dan 5) penyelenggaraan pendidikan kejuruan berfungsi tunggal, yaitu menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan.

Sementara itu, instansi Pembina SMK (Dir.PSMK, 2016) menyatakan bahwa penyelenggaraan proses pembelajaran SMK masih mengalami permasalahan utama, yaitu 1) belum semua kompetensi keahlian yang dibuka di SMK sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan masyarakat di sekitarnya; 2) tingkat kompetensi lulusan belum semuanya sesuai standar yang dibutuhkan industri; 3) lulusan yang sudah kompeten belum mendapat pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat kompetensi; 4) kurangnya informasi ke industri tentang kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK; 5) kurangnya informasi tentang kebutuhan dan peluang kerja bagi lulusan SMK di industri; 6) belum semua regulasi mendukung pengembangan SMK; dan 7) kurangnya dukungan pihak terkait terhadap pengembangan SMK.

Bidang Agribisnis/Agroteknologi merupakan salah satu program prioritas dalam program kerja Kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam Nawacita ke-6 disebutkan bahwa “meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya saing di Pasar Internasional”, yang akan diwujudkan dengan membangun sejumlah *science and tecnopark* di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini. Bidang pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia. Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Brazil, memiliki kekayaan alam serta komoditas pertanian dan peternakan yang melimpah. Menurut data tahun 2013, total luas lahan pertanian di Indonesia sebesar 8,112,103 hektar. Kondisi alam Indonesia sangat kaya

dengan berbagai spesies hayati seperti tumbuhan/tanaman, dan hewan, sehingga terkenal dengan sebutan negara agraris. Namun, Indonesia masih mengimpor kebutuhan pangan, hal itu disebabkan terbatasnya generasi muda yang tertarik menekuni bidang pertanian.

Bidang Agribisnis dan Agroteknologi yang diselenggarakan di SMK meliputi peternakan, perikanan dan kehutanan, termasuk yang berkaitan dengan bisnis dan teknologinya. Bidang Agribisnis dan Agroteknologi memberi peluang kerja bagi lulusan SMK. Namun, kebutuhan akan tenaga tersebut dari tahun ke tahun belum terpenuhi. Ada kecenderungan salah satu penyebab utamanya yaitu kompetensi lulusan SMK bidang tersebut belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah kajian ini yaitu sebagai berikut: 1) kompetensi lulusan SMK belum terkait dan sepadan (*link and match*) dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja; 2) porsi pembelajaran di SMK lebih dominan teori dibanding dengan praktik, dan iklim pembelajarannya (iklim kelas) masih kurang efektif, efisien, dan produktif; 3) Keterbatasan kepemilikan sarpras dan guru produktif yang berpengalaman industri; dan 4) penyelenggaraan SMK cenderung lebih berorientasi pada *supply driven* daripada *demand driven*; 5) Lambatnya pola penyelenggaraan SMK yang menyesuaikan perkembangan iptek.

C. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Kompetensi apa saja yang dibutuhkan dunia kerja dari lulusan SMK Pertanian pada kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)?
2. Bagaimana pola mekanisme penyesuaian kurikulum SMK Pertanian kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) agar selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja?

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk menyusun usulan kebijakan terkait kesesuaian kurikulum SMK Pertanian bidang Agribisnis dan Agroteknologi, Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

Secara lebih operasional pengkajian ini dimaksudkan untuk menghasilkan bahan kebijakan tentang:

1. Kompetensi lulusan SMK Pertanian, kompetensi APHP, Bidang Agribisnis dan Agroteknologi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Pola mekanisme penyesuaian kurikulum SMK Pertanian, kompetensi keahlian APHP, Bidang Agribisnis dan Agroteknologi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Adapun sasaran studi yaitu SMK Pertanian Negeri, khususnya kompetensi keahlian APHP dan mitra DU/DI (institusi pasangannya).

E. Lingkup Studi

Lingkup studi ini dibatasi pada tiga hal yaitu:

1. Kurikulum: Kurikulum 2013 SMK Kompetensi Keahlian APHP, Bidang Agribisnis/Agroteknologi versi perubahan spektrum Tahun 2018
2. Satuan pendidikan: SMK Kompetensi Keahlian APHP (eks SMK.PP/SPMA), Program Keahlian APHP, Bidang Keahlian Agribisnis/Agroteknologi berstatus Negeri, dan
3. Dunia Kerja: DU/DI mitra (Institusi Pasangan) SMK Kompetensi Keahlian APHP.

F. Keluaran

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan usulan kebijakan tentang:

1. Hasil identifikasi kompetensi lulusan SMK Pertanian, Bidang Keahlian Agribisnis/Agroteknologi, Kompetensi Keahlian APHP yang selaras dengan kebutuhan DU/DI, dan
2. Pola Penyelarasan Kurikulum SMK Pertanian Kompetensi Keahlian APHP, Bidang Agribisnis/Agroteknologi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja

G. Pengguna Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi yang relevan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan Kurikulum 2013 khususnya Kompetensi Keahlian APHP, yaitu:

1. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
2. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud
3. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi, dan
4. SMK Pertanian, Kompetensi Keahlian APHP

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Keselarasan SMK Terhadap Kebutuhan Pembangunan

Keselarasn merupakan hubungan atau konektivitas antara satu unsur dengan unsur yang lain atau hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Hubungan tersebut dilandasi oleh satu kesamaan tujuan, kesamaan konsep atau kesamaan pemahaman. Dalam pendidikan, keselarasn dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain hubungan secara internal dalam pendidikan itu sendiri dan hubungan dengan pihak lain di luar pendidikan. Hubungan internal dalam pendidikan dapat dilihat dari hubungan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan. Misalnya, keselarasn pendidikan dasar dengan pendidikan menengah, keselarasn pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, atau keselarasn pendidikan formal dengan pendidikan nonformal atau informal. Keselarasan pendidikan juga dapat ditinjau dari hubungan antara pendidikan dengan lembaga lain di luar lembaga pendidikan, seperti hubungan antara pendidikan dengan DU/DI, masyarakat, atau pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep keselarasn mempunyai berbagai makna atau tujuan. Namun pada intinya, keselarasn dapat diartikan sebagai sebuah hubungan, konektivitas, relasi, atau aktifitas yang saling berhubungan satu sama lain dengan prinsip dan tujuan yang sama.

Dalam bidang pendidikan, keselarasn sangat erat kaitannya dengan arah, program, atau kegiatan di sekolah. Pada tingkat

sekolah menengah, keselarasan pendidikan mengacu pada hubungan antara SMA dengan kelanjutan pendidikan lulusannya ke pendidikan tinggi. Pendidikan lanjutan bagi SMA mengacu pada kesesuaian kompetensi dan jurusan yang diperoleh oleh lulusan selama belajar di SMA dengan jurusan yang akan diikuti di perguruan tinggi. Makin erat keselarasan antara pendidikan di SMA, maka asumsinya siswa/mahasiswa akan makin sukses menyelesaikan studinya. Sebaliknya, keselarasan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) berkaitan dengan kesesuaian antara kompetensi atau keterampilan yang dipelajari di SMK dengan kebutuhan DU/DI. Makin erat keselarasan, lulusan SMK akan semakin mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

Keselarasan pendidikan SMK dengan DU/DI diarahkan pada peningkatan kompetensi atau keterampilan lulusan yang dibutuhkan oleh DU/DI, masyarakat, lembaga pemerintah, atau bekerja mandiri/membuka usaha sendiri. Ahmaloka, rektor ITB mengatakan pada orasi ilmiah dalam rangkaian acara sidang terbuka ITB yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia ke-94 bahwa keselarasan berarti memiliki hubungan atau konektivitas. Meningkatkan keselarasan berarti mengembangkan dan memperkuat konektivitas secara sistematis. Keselarasan yang perlu ditingkatkan pertama dan utama yaitu penelitian dan pengembangan IPTEK, kemudian memasukkan hasil-hasil IPTEK tersebut ke dalam pengajaran IPTEK, maka akan dihasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri (<http://www.itb.ac.id/news/4425.xhtml>).

Berdasarkan konsep keselarasan sebagaimana telah diuraikan di atas, prinsip utama keselarasan pendidikan kejuruan yaitu adanya keterkaitan atau kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dengan DU/DI. Relevansi keduanya mampu meningkatkan kompetensi lulusan SMK sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tuntutan industri. Terkait dengan kesesuaian program pendidikan dengan dunia kerja, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Wardiman Djojonegoro (1998).

Kondisi dan realitas tersebut dikemukakan juga oleh Stevenson (2003:30) yang mengatakan bahwa *“the purpose of vocational education is to meet the needs of industry, meaning that the ‘client’ or ‘customer’ is industry and that industrial standards for work activity should be used as the primary (even exclusive) basis for curricular statements and teaching”*. Tujuan dari pendidikan kejuruan pada intinya menyesuaikan pendidikan dan pelatihan tersebut dengan kebutuhan industri. Semua kegiatan utama yang tertuang dalam silabus pelatihan tersebut harus mengacu pada keahlian yang akan digunakan dalam pekerjaan. Kompetensi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang tidak sejalan dengan tuntutan industri atau yang bertentangan dengan realitas yang ada di industri akan menimbulkan ketidaksesuaian pekerjaan lulusan dengan kenyataan yang ada di industri. Akibat ketidaksesuaian pelatihan dan tuntutan industri menyebabkan kurang bermanfaatnya pelatihan tersebut bagi industri.

Berkaitan dengan hal itu, skenario pendidikan kejuruan harus memperhatikan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan kapasitas pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Salah satu sarana yang menjadi tren peningkatan keterampilan dan

kompetensi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan sekarang ini yaitu *technopark*. Selain untuk pelatihan, *technopark* juga dimanfaatkan sebagai tempat penelitian sains dan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Selain itu, *technopark* dapat dimanfaatkan oleh SMK untuk melatih siswa dan guru dalam meningkatkan kompetensi/keterampilannya.

Proses membangun *partnership* antara sekolah dengan dunia bisnis/industri mencakup empat aspek yaitu: 1) membuat mekanisme pembelajaran di SMK yang didukung oleh pemerintah dan bimbingan dari industri, 2) mempromosikan kerjasama sekolah dan industri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan, 3) mendorong industri dan perusahaan membantu SMK, dan mendorong SMK terlibat dalam pelatihan calon tenaga kerja dan teknisi di perusahaan. Selanjutnya, dalam bidang pengembangan fasilitas pendidikan kejuruan secara merata, kebijakan SMK yaitu menyediakan sarana prasarana SMK sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMK sesuai kebutuhan daerah dan melaksanakan sertifikasi bagi siswa. Dalam peningkatan mutu, kebijakan yang diambil yakni meningkatkan kualitas guru kejuruan melalui 1) pelatihan "guru dengan kompetensi ganda", 2) memberlakukan peraturan keharusan praktik pengalaman kerja (prakerin) bagi guru SMK, dan 3) mendampingi SMK dalam penyempurnaan sistem kepegawaian di sekolah sehingga dapat mempekerjakan instruktur ahli yang berpengalaman kerja agar bisa mengajar di SMK sebagai guru tamu paruh waktu.

Kebijakan strategis dalam kerangka peningkatan kompetensi/keterampilan sumber daya manusia SMK baik siswa maupun guru bertujuan agar semua lulusan SMK mampu melakukan pekerjaan di industri. Peningkatan kualitas guru

melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu program yang penting sesuai dengan visi SMK yaitu menyiapkan lulusan yang mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya di DU/DI. Pendidikan dan pelatihan guru sangat penting agar guru mampu menguasai kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Guru yang tidak menguasai materi dan metode pembelajaran akan sulit mengajar siswanya dan berdampak pada tidak diperolehnya lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan yang baik. Sebaliknya, guru yang menguasai materi dan metode pembelajaran akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan yang baik (Dir. PSMK 2015). Dengan adanya kebijakan tersebut, tindakan yang harus dilakukan oleh SMK yaitu mensinkronkan kurikulum yang dipergunakan di sekolah dan kompetensi yang diperlukan industri.

Sinkronisasi kurikulum dapat tercapai manakala kerjasama antara pihak industri dengan pihak sekolah dapat terjalin dengan baik dan intensif. Sinkronisasi kurikulum bertujuan agar kompetensi dan keterampilan dalam kurikulum sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pekerjaan yang ada di industri. Dengan demikian, ketika siswa melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) mereka tidak asing dengan situasi yang ada di industri.

Selain kerjasama dengan industri, keselarasan pendidikan SMK dengan politeknik juga menjadi fokus pembangunan pendidikan. Kerangka kerja penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja terfokus pada pembangunan pendidikan tahun 2010-2014 yaitu peningkatan akses dan mutu pendidikan

menengah umum dan keselarasan pendidikan kejuruan (SMK dan Politeknik) (Kabinet Indonesia Bersatu jilid II).

1. Hakikat Keselarasan Pendidikan.

Keselarasan kurikulum dalam hal ini meliputi keluasan dan kedalaman kompetensi yang disediakan SMK. Isu keluasan mencakup perbedaan jenis-jenis kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dan jenis kompetensi yang selama ini disediakan oleh SMK. Isu kedalaman kompetensi mencakup tingkat kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dan tingkat kedalaman kompetensi yang selama ini dikembangkan di SMK. Keselarasan pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan, terdiri atas tiga komponen, yakni keselarasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

a. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran diawali dengan pengembangan kurikulum. Pendidikan vokasi yang seharusnya menganut pendekatan *demand driven*, yaitu kebutuhan dunia kerja, memang tampak sudah melibatkan perwakilan dunia kerja dalam mengembangkan kurikulum. Namun pertanyaannya, (i) apakah semua bidang di dunia kerja yang relevan sudah terwakili dalam pengembangan kurikulum, dan (ii) sejauh mana masukan dari sisi calon pemakai lulusan (*demand*) yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum tersebut digunakan dalam mengembangkan kurikulum? Selanjutnya, apakah juga telah dikaji peran “konsorsium bidang kepakaran/keahlian” di Badan Nasional Sertifikasi Profesi

(BNSP) sebagai pakar dari sisi *demand* dalam memberi masukan pada pengembangan kurikulum SMK.

b. Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Keselarasannya pelaksanaan pembelajaran difokuskan pada keselarasannya masukan dan proses pelaksanaan pembelajaran. Keselarasan dari sisi input difokuskan pada keselarasannya kompetensi pendidik dan keselarasannya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan KBM. Keselarasan dari sisi kompetensi pendidik, difokuskan pada guru mata pelajaran produktif, yakni keselarasannya kompetensi dan keterampilan yang senyatanya dikuasai oleh guru mata pelajaran produktif terhadap kompetensi dan keterampilan yang seharusnya mereka kuasai. Keselarasan dari sisi sarana dan prasarana difokuskan pada sarana dan prasarana praktik, yakni keselarasannya sarana dan prasarana praktik yang ada di SMK terhadap sarana produksi yang ada di dunia kerja. Keselarasan dari sisi proses difokuskan pada proses peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja serta proses pembentukan karakter siswa yang selama ini terjadi di SMK terhadap sarana produksi di dunia kerja serta karakter dan budaya kerja di dunia kerja.

c. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar pendidikan vokasi di SMK berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, terdiri atas Ujian Nasional (UN) termasuk di dalamnya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) oleh Pemerintah, dan Ujian Sekolah (US) serta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) oleh satuan

pendidikan. Keberhasilan Uji Kompetensi Keahlian ditandai dengan penerimaan sertifikat kompetensi. Bagi pendidikan vokasi, sertifikat kompetensi lebih penting, mengingat pada era perdagangan bebas, termasuk MEA, satu-satunya kriteria yang masuk ke dunia kerja adalah sertifikat kompetensi berstandar regional ASEAN atau internasional. Isu utama keselarasan dalam penilaian hasil belajar yaitu kendala siswa SMK untuk memperoleh sertifikat kompetensi untuk bersaing dan berebut kesempatan kerja di dalam negeri dan peluang masuk ke dunia kerja luar negeri.

2. Keselarasan SMK dan DU/DI

Dalam penyelenggaraan pendidikan SMK, keselarasan diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan industri, program afirmasi, dan *job matching* bagi lulusan SMK. Komponen-komponen yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kompetensi lulusan SMK, *Information and Communication Technology* (ICT), bahasa asing, kewirausahaan, dan membangun kerjasama antara sekolah dan dunia bisnis. Pelaksanaan pembelajaran di SMK dan pelatihan kejuruan akan berhasil dengan baik jika didukung oleh kerjasama antara sekolah dan DU/DI. DU/DI diharapkan secara terus-menerus membantu untuk melatih siswa SMK melakukan praktik industri agar mampu menjadi calon tenaga kerja terampil dan berkualitas.

Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi siswa calon lulusan SMK harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Keselarasan pendidikan dan DU/DI memerlukan pengembangan dan penguatan komponen-komponen pendukung, antara lain:

- a. Pengembangan fasilitas pendidikan kejuruan secara merata
 - 1) Menyediakan sarana prasarana SMK sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMK sesuai kebutuhan daerah;
 - 2) Mengembangkan SMK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan pelaksana sertifikasi bagi siswa SMK dan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas guru kejuruan
 - 1) Melatih guru dengan kompetensi ganda (*double competence*)
 - 2) Memberlakukan peraturan keharusan praktik pengalaman kerja bagi guru SMK, dan
 - 3) Mendampingi SMK dalam penyempurnaan sistem kepegawaian di sekolah sehingga dapat mempekerjakan guru ahli yang berpengalaman kerja agar bisa mengajar SMK sebagai guru tamu paruh waktu (Arah Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK tahun 2015).

Keselarasan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan nyata industri agar produktifitas kerja karyawan meningkat dan berkualitas. Sebaliknya, jika tidak relevan dengan kebutuhan DU/DI, kegiatan pendidikan dan pelatihan berarti tidak sesuai (*mismatch*) dengan kebutuhan DU/DI dan hasil yang dicapai akan berdampak pada tidak efisien dan tidak efektifnya program tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keselarasan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DU/DI akan menghasilkan SDM yang bermutu dan memiliki kompetensi/ keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI.

B. Kurikulum SMK

Pada penelitian ini, kurikulum SMK yang dikaji yaitu Kurikulum 2013. Pengertian Kurikulum 2013 sebagaimana dikemukakan Ade Mulyadi (2014) adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi pondasi pada tingkat berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2003).

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, *skill*, dan pendidikan berkarakter, sehingga siswa dituntut untuk mampu memahami bahan ajar (materi) dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan proaktif dalam berdiskusi dan melakukan presentasi serta memiliki sopan santun (etika) dan disiplin tinggi. Kurikulum ini menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diimplementasikan sejak 2006. Dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada semua jenis, satuan, dan jenjang pendidikan.

Khusus untuk SMK, struktur kurikulum dikelompokkan dalam tiga kelompok mata pelajaran; A, B, dan C. Kelompok mapel A mengenai Nasionalisme; Kelompok B mengenai Wawasan Kebangsaan; dan Kelompok C mengenai Peminatan Kejuruan. Kelompok mata pelajaran C dibagi atas C1, C2, dan C3. Kelompok mapel C1 meliputi dasar bidang keahlian; Kelompok

mapel C2 meliputi dasar program keahlian; dan Kelompok mapel C3 meliputi kompetensi keahlian (Dir. PSMK, 2015).

Keselarasan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dalam penelitian ini meliputi keluasan dan kedalaman kompetensi yang diajarkan SMK dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja berdasarkan skema sertifikasi KKN level II yang telah ditetapkan oleh BNSP dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Isu keluasan mencakup perbedaan jenis-jenis kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dan jenis kompetensi yang selama ini diajarkan oleh SMK. Isu kedalaman kompetensi mencakup tingkat kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dan tingkat kedalaman kompetensi yang selama ini dikembangkan di SMK. Keselarasan pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan terdiri atas tiga komponen, yakni keselarasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil kegiatan belajar mengajar.

1. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Isi atau konten kurikulum terdiri dari kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran; b) KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang, kelas, dan mata pelajaran; c) KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik SMK; d) KI dan KD pada jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap,

namun pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi); e) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (*organizing elements*) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti; f) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) yang diikat oleh kompetensi inti; g) Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut; dan h) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan dari setiap KD untuk masing-masing mata pelajaran di setiap kelas (Puskurbuk, 2013).

2. Proses Pembelajaran Kurikulum 2013

Proses pembelajaran Kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler yaitu proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat (DU/DI). Pembelajaran didasarkan pada prinsip berikut: 1) Proses pembelajaran intrakurikuler merupakan proses pembelajaran di SMK/MAK berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan guru; 2) Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai KD dan KI pada tingkat yang memuaskan. Pembelajaran ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang

dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin dalam setiap minggu.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan minat peserta didik terhadap kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan melalui pembelajaran kelas biasa untuk mengembangkan kemampuan dasar yang difokuskan pada kepemimpinan, hubungan sosial, kemanusiaan, serta berbagai keterampilan hidup. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan alam. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler.

3. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Belajar bukan merupakan suatu tujuan, namun merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Belajar merupakan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh dan belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku peserta didik. Sementara itu, Gagne (dalam Kokom Komalasari, 2013) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis *performance* (kinerja).

b. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung pada motivasi pelajar dan kualitas serta kreatifitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan berhasil mencapai target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan peserta didik melalui proses belajar.

Mohamad Surya (2014) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh, sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Kokom Komalasari (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen, yaitu 1) peserta didik, seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, 2) guru,

seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif, 3) tujuan, pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, dan afektif) yang diinginkan terjadi pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, 4) isi pelajaran, segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 5) metode, cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan, 6) media, bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada peserta didik, dan 7) evaluasi, cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya.

c. Pembelajaran *Teaching Factory* dan *Technopark*

Dalam upaya meningkatkan kompetensi keahlian di bidang tertentu, pembelajaran praktik di SMK dilakukan dengan pembelajaran sesuai dengan kondisi riil di dunia kerja/industri atau lebih dikenal dengan nama *Teaching Factory (TeFa)*. Pembelajaran ini merupakan bentuk kerjasama SMK dengan DU/DI berbentuk bimbingan DU/DI kepada SMK sesuai dengan jenis produksi perusahaan.

Technopark merupakan salah satu bentuk wadah untuk menghubungkan institusi satuan pendidikan (SMK) dengan DU/DI. Stakeholder dari suatu Technopark biasanya pemerintah daerah, komunitas bisnis/entrepreneur dan finansial. Dengan kata lain, Technopark merupakan wahana berbisnis atas hasil/produk SMK yang bersifat inovatif dan memiliki nilai tambah/nilai jual. Hal ini dapat

menumbuhkembangkan gagasan inovatif SMK yang sekaligus menunjukkan kualitas SMK.

Pembangunan Technopark di SMK telah diprogramkan dalam salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo. Hal ini telah berulang kali disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, yaitu agar pemerintah fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Menurut prediksi, pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif, dan 60% penduduk usia muda di tahun 2045 harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia Emas pada 100 tahun kemerdekaan (Fasli Jalal, 2015).

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven*. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, antara lain Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kemendikbud untuk membuat peta jalan pengembangan SMK dan menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan (*link and match*).

Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara secara global, khususnya dalam penerapan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan sejak akhir tahun 2015, Indonesia

dihadapkan pada persaingan yang makin ketat, termasuk dalam penyediaan tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan lapangan kerja lain di negara-negara anggota MEA.

Penerapan TeFa di SMK dapat mendorong mekanisme kerja sama antar SMK dengan DU/DI yang saling menguntungkan, sehingga SMK akan selalu mengikuti perkembangan industri secara otomatis (transfer teknologi, manajerial, pengembangan kurikulum, prakerin, dan bentuk kerjasama lainnya). Program *technopark* di SMK dicanangkan sebagai pusat dari beberapa *TeFa* di SMK yang menghubungkan dunia industri dan instansi yang relevan untuk bekerja sama dengan *TeFa* di SMK. Technopark akan menjadi “*think tank*” SMK dalam pengembangan yang sesuai dengan perkembangan industri yang pesat. *Technopark* juga akan mempromosikan potensi daerah yang relevan untuk pengembangan ekonomi daerah dan sekaligus mempermudah komunikasi dengan dunia industri.

Salah satu tujuan utama program *TeFa* dan *technopark* di SMK dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK di berbagai kompetensi keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga berdampak pada penguatan daya saing industri. Kompetensi yang diperoleh secara integratif melalui penerapan TeFa merupakan kompetensi yang komprehensif meliputi keahlian dalam ranah psikomotorik, afektif/sikap (*attitude*) dan kemampuan berpikir/mental (*cognitive*) dengan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yaitu mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking*

dan *problem solving*). Dengan demikian, pendidikan di SMK akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dari sisi keterampilan (*hardskill*), namun juga produktif (Dit.PSMK 2016a).

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan DU/DI yang terus menerus berkembang. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di angka 9,84%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih diwarnai adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total jumlah pengangguran terbuka secara nasional pada Agustus 2014 mencapai 7,24 juta orang atau 5,94% dari total angkatan kerja. Jumlah pengangguran yang tinggi dimungkinkan karena kompetensi yang dimiliki oleh SDM Indonesia masih rendah dibandingkan kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI atau karena peluang kerja yang memang tidak cukup untuk menampung semua lulusan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sekolah dan perguruan tinggi.

SMK merupakan salah satu jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja. Salah satu tujuan penting pengembangan program pendidikan SMK adalah menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, memiliki kepemimpinan tinggi, disiplin, profesional, handal di bidangnya dan produktif. Dengan demikian, lulusan SMK idealnya merupakan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai,

dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri. Permasalahan SMK saat ini umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, masih rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang belum sesuai dengan dunia kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksiapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja mempunyai efek domino terhadap industri pemakai. Sebagai pengguna tenaga kerja, industri harus menyelenggarakan pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Sebenarnya pihak industri dan pihak sekolah memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan lingkungan belajar, sementara pihak industri memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap pakai, perlu dilakukan kerja sama antara SMK dengan DU/DI dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja dan pada akhirnya juga akan meningkatkan mutu SMK.

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata melalui kerja sama program, dukungan finansial untuk penelitian, dan beasiswa peserta didik. Bahkan di beberapa negara, peran industri ini sudah menjadi kewajiban karena telah ada regulasi yang mengaturnya. Di sisi lain, pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh

perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Secara kurikulum, pendidikan kewirausahaan masuk dalam mata pelajaran adaptif, artinya terdapat beberapa teori yang harus dipelajari oleh siswa, sehingga pendidikan kewirausahaan bersifat teoritis di kelas, sedangkan masyarakat masih memandang bahwa menjadi pegawai lebih prestise dan nyaman dibandingkan dengan menjadi wirausaha. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah secara maksimal meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program pendidikan, menanamkan jiwa wirausaha di setiap jenjang dan tingkat pendidikan, serta berusaha memperluas lapangan kerja. Diharapkan pada tahun 2020, melalui program revitalisasi SMK, akan terwujud tujuh kondisi SMK salah satunya yaitu 750 *TeFa* dan *Technopark* di SMK yang berfungsi sebagai Rumah Inovasi.

Tujuan pengembangan *TeFa* dan *Technopark* di SMK yaitu sebagai berikut: 1) Memetakan kondisi Pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* di SMK di semua provinsi di Indonesia; 2) Menyusun strategi pelaksanaan Program Pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* di SMK pada tingkat nasional; 3) Menyusun rekomendasi pelaksanaan program pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* di SMK di setiap provinsi disesuaikan dengan kondisi internal dan kondisi eksternal pendidikan kejuruan di masing-masing provinsi; 4) Memberikan persepsi dan pemahaman yang seragam tentang *TeFa* dan *Technopark* di SMK dengan tujuan utamanya yaitu pendidikan SMK yang

berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri (Dit.PSMK 2016a).

4. Struktur Kurikulum APHP dan Agroindustri

Berikut adalah Struktur Kurikulum kelompok mapel C2 dan C3, SMK Kompetensi Keahlian APHP dengan masa studi 3 tahun (Tabel 1), dan SMK Kompetensi Keahlian Agribisnis dengan masa studi 4 tahun (Tabel 2), Program Keahlian APHP.

Tabel 1. Struktur Kurikulum APHP

5. Bidang Keahlian: Agribisnis dan Agroteknologi								
5.4. Program Keahlian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian								
5.4.3. Kompetensi Keahlian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian								
MATA PELAJARAN			K E L A S					
			X		XI		XII	
			1	2	1	2	1	2
C2. Dasar Program Keahlian								
1	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian		3	3	-	-	-	-
2	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian		5	5	-	-	-	-
3	Dasar Pengendalian Mutu Hasil pertanian		4	4	-	-	-	-
C3. Kompetensi Keahlian								
1	Produksi Pengolahan Hasil Nabati		-	-	9	9	10	10
2	Produksi Pengolahan Hasil Hewani		-	-	5	5	5	5
3	Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal		-	-	6	6	6	6
4	Keamanan Pangan, Penyimpanan, dan Penggudangan		-	-	4	4	4	4

5	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	-	-	5	5	5	5
Jumlah C(C1, C2, dan C3)		22	22	29	29	30	30
Total		46	46	46	46	46	46

Sumber: Dir.PSMK, 2015

Tabel 2. Struktur Kurikulum Agroindustri

5. Bidang Keahlian: Agribisnis dan Agroteknologi									
5.4. Program Keahlian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian									
5.4.3. Kompetensi Keahlian: Agroindustri									
MATA PELAJARAN		K E L A S							
		X		XI		XII		XIII	
		1	2	1	2	1	2	1	2
C2. Dasar Program Keahlian									
	Dasar Penanganan								
1	Bahan Hasil Pertanian	4	4	-	-	-	-	-	-
	Dasar Proses								
2	Pengolahan Hasil Pertanian	4	4	-	-	-	-	-	-
	Dasar Pengendalian								
3	Mutu Hasil pertanian	4	4	-	-	-	-	-	-
C3. Kompetensi Keahlian									
1	Produksi Hasil Nabati	-	-	5	5	5	5	6	6
2	Produksi Hasil Hewani	-	-	5	5	5	5	8	8
3	Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal	-	-	5	5	5	5	8	8
4	Keamanan Pangan dan Sistem Jaminan Mutu (<i>Quality System</i>)	-	-	5	5	6	6	8	8
5	Penyimpanan dan Penggudangan	-	-	4	4	4	4	4	4

6 Produk Kreatif dan Kewirausahaan	-	-	7	7	8	8	10	10
Jumlah C (C1, C2, dan C3)	22	22	31	31	33	33	44	44
Total	46	46	48	48	48	48	48	48

Sumber: Dir.PSMK, 2015

5. Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum 2013

a. Kelebihan Kurikulum 2013

Terdapat beberapa kelebihan pada Kurikulum 2013 diantaranya: (a) Menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual) karena berfokus dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan hanya transfer pengetahuan; (b) Berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu; (c) Terdapat mata pelajaran pada bidang studi tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan/kejuruan; (d) Lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter penting untuk diintegrasikan menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter dapat diintegrasikan kesemua program studi; (e) Diasumsikan

tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota (seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka); dan (f) Kesiapan guru. Guru harus selalu dipacu untuk melakukan *update* dan *upgrade* terhadap kemampuannya melalui berbagai pelatihan-pelatihan fungsional. Begitu pula terhadap kualifikasi pendidikan dan keprofesionalannya.

b. Kelemahan Kurikulum 2013

Beberapa kelemahan kurikulum di antaranya:

a) Pemerintah/sekolah berpandangan semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru jarang sekali dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013; b) Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan Ujian Nasional (UN) masih diberlakukan; dan c) Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun keilmuan tersebut berbeda.

6. Penjurusan (Spektrum) Bidang Agribisnis/Agroteknologi

Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian merupakan salah satu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat di berbagai pelosok. Indonesia sebagai negara agraris memiliki peluang yang sangat leluasa untuk mengembangkan bidang pertanian dari berbagai sektor. Bahkan, pertanian memiliki “daya dorong” perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, ketahanan pangan, agribisnis dan agroindustri, perekonomian rakyat, dan

agrowisata serta ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Mengacu pada pengembangan Spektrum Keahlian SMK, Program Keahlian APHP pada Bidang Keahlian Agribisnis/Agroteknologi telah dikembangkan menjadi 3 (tiga) kompetensi keahlian (Dir. PSMK, 2015). Masing-masing kompetensi keahlian dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang berorientasi pada kebutuhan DU/DI. Di bidang Agribisnis, setiap SMK Pertanian diharapkan dapat melakukan *update* dan *upgrade* perkembangan iptek dan kebutuhan DU/DI.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, lulusan SMK Agribisnis dan Agroteknologi tahun 2016 berjumlah 52,319 orang; dari jumlah tersebut tidak memenuhi 15% jumlah tenaga yang dibutuhkan, yaitu 445,792 orang. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa masih ada hampir 400,000 lapangan kerja diperuntukkan bagi lulusan SMK bidang keahlian Agribisnis pengelolaan hasil pertanian. Secara legal formal, Spektrum Keahlian pada SMK masih mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Keahlian di SMK, yang mengelompokan Bidang Keahlian menjadi 6, yaitu (1) Teknologi dan rekayasa, (2) Teknologi informasi dan komunikasi, (3) Kesehatan, (4) Seni, Kerajinan dan pariwisata, (5) Agribisnis dan agroteknologi, dan (6) Bisnis dan manajemen. Dalam perkembangan terkini, Direktorat Jenderal Dikdasmen telah menerbitkan Peraturan No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum

Keahlian SMK/MAK, yang mengelompokan keahlian ke dalam 9 Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 146 Paket Keahlian. Dari 146 Paket Keahlian tersebut, sebanyak 34 Paket Keahlian akan dikembangkan masa studinya selama 4 tahun, dan yang lainnya tetap 3 tahun.

Secara terminologi, dalam spektrum keahlian pendidikan kejuruan menggunakan istilah bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Bidang keahlian adalah kelompok atau rumpun keahlian di SMK, program keahlian adalah jurusan dalam suatu bidang keahlian, dan kompetensi keahlian adalah spesialisasi dalam suatu program keahlian. Secara lengkap rincian spektrum keahlian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Spektrum Keahlian SMK/MAK Program Keahlian APHP

Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Tahun	
			3	4
Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	
		Agribisnis Tanaman Perkebunan	√	
		Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman		√
		Lanskap dan Pertamanan	√	
		Produksi dan Pengelolaan Perkebunan		√
		Agribisnis Organik Ekologi		√

Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Tahun	
			3	4
	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	√	
		Agribisnis Ternak Unggas	√	
		Industri Peternakan		√
	Kesehatan Hewan	Keperawatan Hewan	√	
		Kesehatan dan Reproduksi Hewan		√
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	√	
		Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	√	
		Agroindustri		√
	Teknik Pertanian	Alat Mesin Pertanian	√	
		Otomatisasi Pertanian		√
	Kehutanan	Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	√	
		Konservasi Sumberdaya Hutan	√	
		Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	√	
		Teknologi Produksi Hasil Hutan	√	

Sumber: Peraturan Dirjen. Dikdasmen No. 06/D.D5/KK/2018

7. Praktik Kerja Industri (Prakerin)

Praktik kerja industri (prakerin) atau praktik kerja lapangan (PKL) mempunyai penyebutan atau istilah yang berbeda pada kurikulum sesuai dengan zamannya, walaupun esensinya tetap sama. Pada kurikulum 2013, kegiatan magang di industri disebut praktik kerja industri (Prakerin) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL). Pada kurikulum 2006 dikenal dengan nama Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Praktek kerja industri juga merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh siswa SMK sebagai bentuk pendidikan dan pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan dalam industri.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK yaitu mengoptimalkan pembelajaran teori dan praktik dasar di sekolah dan pembelajaran praktik kejuruan di DU/DI (*dual system*) atau pendidikan sistem ganda (*link and match*). Berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan SMK, bagi siswa SMK wajib mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kerja industri (prakerin). Pada hakikatnya prakerin merupakan suatu program praktik/latihan yang diselenggarakan di lapangan (DU/DI) dalam rangkaian kegiatan pembelajaran sebagai bagian integral program pendidikan. Dengan demikian, prakerin diyakini memiliki korelasi positif terhadap kesiapan kerja lulusan SMK.

Prakerin merupakan bagian dari implementasi konsep dual system (*link and match*) atau PSG yang diterapkan SMK. Mendikbud memaknai prakerin sebagai rangkaian konsep

pendidikan kejuruan yang memadukan program belajar-mengajar di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kerja langsung di DU/DI.

Menurut Teck Heang Lee (2012), pentingnya pengalaman kerja industri dalam membentuk siswa untuk siap bekerja tercermin dari partisipasi siswa dalam program magang. Sementara itu, Oemar Hamalik (2007) mendefinisikan prakerin sebagai model pelatihan yang diselenggarakan di lapangan kerja, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam keahlian tertentu, sesuai tuntutan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, kompetensi keahlian yang diperoleh di sekolah dapat ditingkatkan sebagai bekal kesiapan kerja sekaligus menumbuhkan a) sikap percaya diri untuk bekerja, b) motivasi kerja, dan c) kemampuan untuk bersosialisasi di lingkungan kerjanya. Dengan kata lain, prakerin merupakan kegiatan kurikuler yang memberi kesempatan kepada siswa SMK untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mereka memiliki kesiapan kerja lebih memadai setelah mereka lulus. Hal tersebut senada dengan pendapat Mulyasa (2014) bahwa pelaksanaan prakerin dapat meningkatkan pengembangan diri (*personality development*).

Sehubungan dengan itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Ditjen. Dikdasmen menetapkan prakerin/praktik kerja lapangan menjadi salah satu program pendukung penyelenggaraan SMK dalam upaya menghasilkan calon tenaga kerja yang berkualitas (Dit. PSMK 2016a). Dari waktu ke waktu, Dit. PSMK terus menyempurnakan program pelaksanaan praktik kerja

lapangan/prakerin agar keterkaitan dan kesepadanan pendidikan antara SMK dan DU/DI dapat terwujud sesuai tujuan yang ditetapkan.

Wardiman Djojonegoro (1998) berpendapat bahwa pelaksanaan prakerin bagi siswa dimaksudkan untuk 1) menghasilkan tenaga kerja yang profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, 2) meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan dan dunia industri, 3) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan di dunia industri, dan 4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Menurut Nurcahyono (2015) praktik kerja industri merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematis dan sinkron pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat profesional tertentu.

Pendapat lainnya dari Aminuddin dan M. Najib (2013) mengemukakan bahwa kemampuan siswa dalam memenuhi persyaratan pekerjaan, dalam hal ini kesiapan kerja tergantung pada beberapa faktor, salah satunya pelatihan industri. Pengalaman dimaksud penting untuk mengembangkan siswa dalam keseimbangan berdasarkan kebutuhan pekerjaan untuk mencegah hambatan dalam melakukan pekerjaan. Pengalaman yang diperoleh pada saat

melakukan praktik kerja lapangan akan menjadikan siswa lebih matang dalam mempersiapkan diri untuk bekerja karena pengalaman praktik kerja industri memberikan bekal pengalaman nyata pekerjaan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Lebih lanjut, Aminuddin dan M. Najib (2013) mengemukakan bahwa kemampuan siswa dalam memenuhi persyaratan pekerjaan dalam hal ini kesiapan kerja tergantung pada beberapa faktor seperti pelatihan industri, hal tersebut penting untuk mengembangkan siswa dalam keseimbangan berdasarkan kebutuhan pekerjaan untuk mencegah hambatan. Pengalaman yang diperoleh pada saat melakukan praktik kerja lapangan akan menjadikan siswa lebih matang dalam mempersiapkan diri untuk bekerja karena pengalaman praktik kerja lapangan memberikan bekal pekerjaan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Ditinjau dari aspek manfaat, Yuli (2012) berpendapat bahwa penyelenggaraan prakerin memiliki manfaat bagi semua pihak, yaitu siswa, sekolah, dan DU/DI. Manfaat prakerin bagi siswa, yaitu 1) hasil belajar peserta prakerin akan lebih bermakna karena setelah tamat akan betul-betul memiliki keahlian yang mengarah profesional sebagai bekal pengembangan diri secara berkelanjutan, 2) keahlian yang profesional yang diperoleh dapat meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri sehingga akan mendorong profesionalisme dalam bekerja. Bagi sekolah (SMK), prakerin bermanfaat untuk 1) mencapai tujuan pendidikan untuk menciptakan keahlian profesional bagi peserta didik, dan 2) memberikan kepuasan bagi penyelenggara pendidikan sekolah, karena tamatannya terjamin memperoleh manfaat baik di dunia kerja, maupun di

masyarakat. Manfaat prakerin bagi DU/DI, yaitu 1) perusahaan dapat mengenal kualitas peserta prakerin yang belajar di industrinya, 2) peserta prakerin merupakan calon tenaga kerja yang memberikan keuntungan bagi industri, 3) perusahaan dapat memberi tugas kepada peserta prakerin untuk kepentingan perusahaan sesuai kompetensi yang dimiliki, 4) peserta prakerin lebih mudah diatur dalam hal disiplin berupa kepatuhan terhadap aturan perusahaan, dan 5) memberikan kepuasan kepada industri karena rekognisi turut serta menentukan masa depan siswa melalui prakerin (Yuli, 2012).

Pendapat Yuli tersebut sejalan dengan ketetapan Direktorat PSMK (2016b) yang merumuskan beberapa manfaat prakerin/PKL bagi berbagai pihak sebagai berikut. Prakerin bagi siswa, bermanfaat untuk 1) mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah, 2) menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja, 3) menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi, 4) memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL/prakerin, dan 5) mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan/arahan pembimbing industri.

Selanjutnya, prakerin bagi sekolah bermanfaat untuk 1) menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja, 2) meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama prakerin, 3) mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, *TeFa*, dan pengembangan

sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat prakerin, dan 4) meningkatkan kualitas lulusan.

Idealnya, dalam penyelenggaraannya prakerin harus direncanakan bersama oleh SMK dan dunia industri, khususnya dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berfokus pada 1) standar kompetensi yang mengacu pada SKKNI, 2) standar penilaian dan sertifikasi, 3) kelembagaan, dan 4) nilai tambah dan insentif. Dengan demikian, industri dapat berperan sejak dari proses perencanaan pelaksanaan termasuk kompetensi siswa yang dibutuhkan, program, dan kapasitasnya serta pembimbingan yang akan diberikan hingga pada tahap evaluasi dan sertifikasi hasil prakerin.

8. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi SDM Indonesia dengan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara sektor pendidikan dengan sektor pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja (sertifikasi) sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) secara nasional untuk menghasilkan SDM nasional yang bermutu dan produktif (Perpres. Nomor 8 tahun 2012).

Dengan demikian, peran dari KKNi khususnya terkait dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh SMK yaitu untuk menentukan posisi jabatan lulusan SMK baik yang sudah memiliki pengalaman kerja maupun belum. KKNi menyatakan sembilan jenjang kualifikasi SDM Indonesia yaitu meliputi: 1) Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; 2) Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan 3) Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Adapun SKKNI menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut deskripsi jenjang KKNi (Tabel 4) sesuai Permenakertrans Nomor 5/2012.

Tabel 4. Deskripsi Jenjang KKNi

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. C. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. D. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. E. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. F. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	a. Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. b. Memiliki pengetahuan faktual. c. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	a. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. b. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.

Jenjang Kualifikasi	Uraian
	c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
3	a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. b. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

Jenjang Kualifikasi	Uraian
	d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

Jenjang Kualifikasi	Uraian
	d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya

Jenjang Kualifikasi	Uraian
	melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Sumber: Perpres. No 8/2012

KKNI dikembangkan melalui berbagai kesepakatan antara Kemendiknas dan Kemnakertrans. Dalam proses pengembangannya, KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah Kemdikbud, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja. KKNI dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi di tingkat nasional untuk menetapkan kriteria penilaian kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang calon anggota sebelumnya atau seorang anggota yang ingin meningkatkan jenjang predikat keanggotaannya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, dan industri juga membutuhkan KKNI sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya secara lebih komprehensif dan akurat, baik yang berhubungan dengan sistem karier, remunerasi, maupun pola rekrutmen baru. Berikut ini tujuan, manfaat dan deskriptor KKNI

C. Kompetensi

Berdasarkan kurikulum SMK Tahun 2013, kompetensi dimaknai sebagai kemampuan yang merupakan perpaduan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) untuk melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan. Finch & Crunkilton dalam Mulyasa (2005) mengemukakan, “kompetensi diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian, terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh DU/DI. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam penelitian ini yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang bertujuan untuk perubahan tingkah laku yang meliputi kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan apresiasi sebagai perubahan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia usaha.

Mengacu pada Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) level II, kompetensi lebih berorientasi pada kecakapan yang mendukung pada jabatan tertentu, sesuai dengan ketentuan definisi “Standar KKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk

menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional”. Dengan demikian, definisi kompetensi dari manapun sumbernya akan tetap menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan (Perpres. No.8/2012).

Hasil penelitian Harjono Notodihardjo (1990) menunjukkan bahwa pengguna kompetensi mengharapkan adanya kompetensi akademik yang relevan dengan 06 JPE DP, Desember 2010 dalam hal pengalaman praktik kerja. Kompetensi menjadi hal penting dalam dunia kerja karena adanya anggapan "karakteristik dasar seseorang ada hubungan sebab-akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja" (Spencer & Spencer, 1993). Marshal Sashkin dan Kisser (1993) mengemukakan “Jika seorang lulusan memasuki dunia kerja maka kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi yang mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja perusahaan dalam era globalisasi mengacu pada produktivitas untuk dapat memenangkan persaingan.” Kompetensi menjadi hal penting dalam dunia kerja karena adanya anggapan “karakteristik dasar seseorang ada hubungan sebab-akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja” (Spencer & Spencer, 1993).

D. Dunia Kerja

Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan pekerja melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Masyarakat menyadari bahwa sumber daya manusia adalah salah satu unsur dalam organisasi yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan organisasi

tersebut sehingga maju mundurnya suatu organisasi tergantung pada peran yang dilakukan oleh orang - orang yang berada di dalamnya. Secanggih apapun alat dan sarana kerja yang dimiliki perusahaan, tanpa adanya fungsi kerja manusia maka keberadaan perusahaan tidak akan berarti apa-apa, hal ini dikarenakan manusia memiliki kemampuan tenaga dan pikiran untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut.

Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan dan menuntut seluruh karyawan selalu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Salah satu faktor penentu keberhasilan kerja yaitu perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, karyawan harus memiliki kompetensi keahlian di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan kerja, harus ada kesesuaian antara kompetensi pekerjaan yang dimiliki calon karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Karyawan merupakan salah satu aset utama dalam suatu perusahaan yang saat ini semakin diakui keberadaannya. Hal ini dikarenakan penentu dari sebuah keberhasilan kerja dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan salah satunya yaitu karyawan yang produktif. Perusahaan selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik bagi karyawannya agar tetap tinggal di perusahaan tempat ia bekerja. Salah satunya berupa pembayaran upah, penghargaan atau peluang dalam bekerja, maupun rasa aman dalam lingkungan perusahaan. Sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi karyawan diperlukan sebuah *“reward”* yang biasanya berbentuk penambahan upah/gaji di akhir tahun atau tunjangan hari raya (THR).

Menurut Stephen Robbins (2003), karyawan menginginkan suatu kepuasan kerja yang diindikasikan dalam bentuk sikap individu secara umum terhadap hasil kerjanya. Secara keseluruhan, kepuasan kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pekerjaan. Ketidakpuasan kerja yang dimiliki karyawan akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang terjadi dalam diri karyawan maupun perusahaan tempat mereka bekerja. Akibatnya, perusahaan terpaksa menanggung beban biaya yang cukup tinggi apabila kepuasan kerja karyawan tidak diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan adanya karyawan yang berhenti kerja, sering kali absen (bolos) kerja, dan beberapa masalah pelanggaran disiplin yang dapat menyebabkan biaya pengeluaran yang cukup tinggi dalam perusahaan, serta menurunnya prestasi kerja dalam perusahaan tersebut.

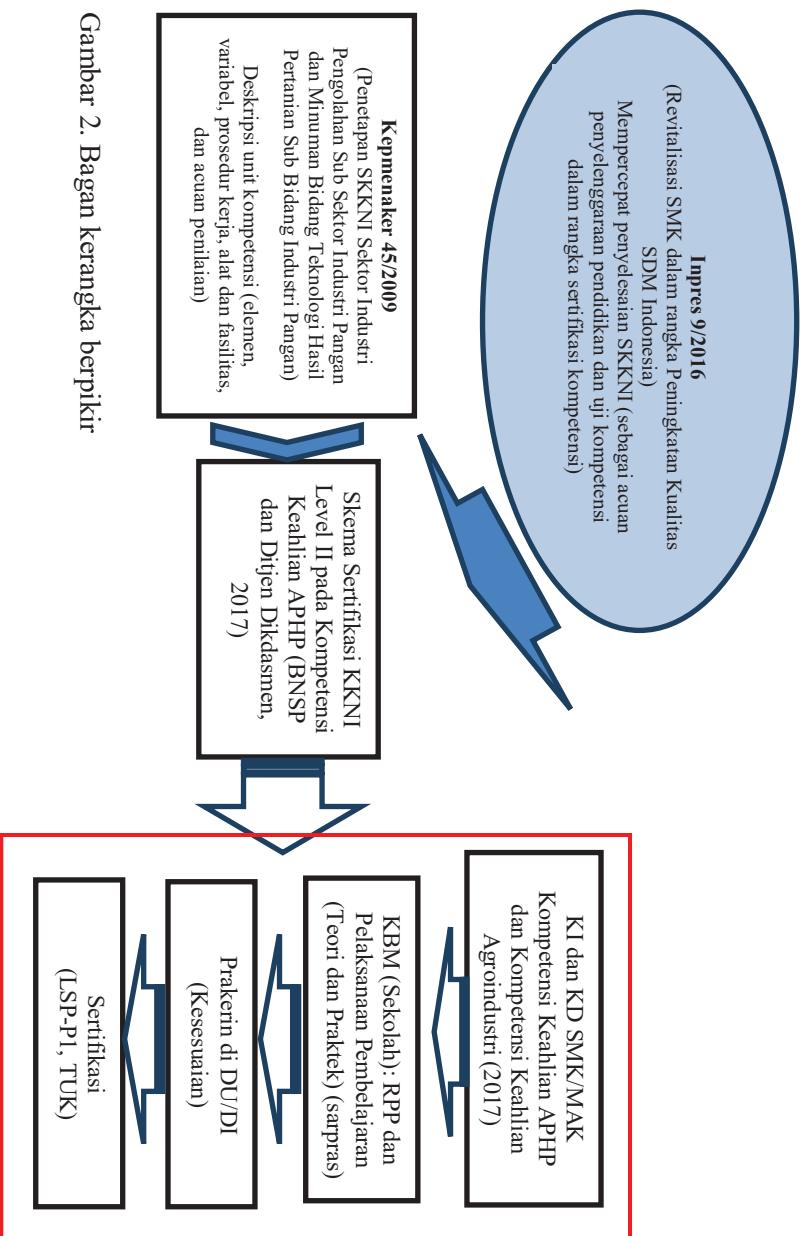
E. Kerangka Pikir Penelitian

Inpres No. 9 Tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMK harus mengacu kepada SKKNI. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Skema Sertifikasi KKNi level II untuk masing-masing Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh setiap SMK. SKKNI level II untuk Kompetensi Keahlian APHP itu sendiri diturunkan dari SKKNI untuk subsektor industri pangan dan minuman bidang teknologi hasil pertanian subbidang industri pangan, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 45 Tahun 2009. Skema Sertifikasi KKNi ini berisi deskripsi unit-unit kompetensi mulai dari elemen, variabel, prosedur kerja, alat dan fasilitas, hingga acuan penilaian yang digunakan. Skema Sertifikasi KKNi level II untuk Kompetensi Keahlian APHP

terdiri dari 17 unit kompetensi Umum/Inti, dan 13 unit kompetensi pilihan, dan telah disahkan bersama oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dan Kepala BNSP pada November 2017. Untuk dapat dikatakan sesuai atau selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI, kurikulum dan pelaksanaannya (proses pembelajaran) di sekolah harus mengacu kepada Skema Sertifikasi KKNi yang pada hakikatnya adalah merupakan kebutuhan DU/DI, karena Skema Sertifikasi KKNi itu sendiri disusun oleh pihak DU/DI dengan difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dalam mekanismenya, kesesuaian itu harus dapat ditunjukkan oleh tiga pilar (tahapan) yaitu unit-unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi KKNi: (i) diadopsi (diserap) ke dalam Kurikulum (KI-KD) dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran (RPP-Silabus), (ii) dipraktikkan dalam program Prakerin, dan (iii) dilakukan sertifikasi. Secara skematis, bagan kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Ketidakselarasan antara SMK dengan DU/DI merupakan fakta yang umum ditemui di lapangan. Ketidakselarasan yang dimaksud di sini terkait dengan kurikulum, yakni kesesuaian materi dengan jenis dan kedalaman kompetensi antara yang diajarkan di SMK dengan yang dibutuhkan DU/DI. Konsekuensi dari ketidakselarasan tersebut menimbulkan masalah dan kesenjangan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Kerjasama antara SMK dengan DU/DI perlu dilakukan dengan pola mekanisme yang saling memahami dan menguntungkan bagi kedua pihak. Aspek yang dapat dikatakan paling penting dari kerjasama tersebut yaitu pemberian sertifikat kepada lulusan SMK melalui uji sertifikasi oleh LSP sebagai bentuk akuntabilitas dan pengakuan keahlian sehingga

lulusan dapat segera diserap oleh DU/DI. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya revitalisasi pada aspek-aspek (i) keselarasan, (ii) mekanisme kerjasama, dan (iii) peningkatan akses sertifikasi antara SMK dengan DU/DI dan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan (SMK).



Gambar 2. Bagan kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam hal ini menggunakan metode kasus untuk mendeskripsikan penyesuaian kurikulum pada tingkat mata pelajaran, dan/atau pada tingkat KI-KD masing-masing mata pelajaran, pelaksanaan prakerin, proses sertifikasi, dan pengembangan kewirausahaan siswa dan sekolah.

B. Variabel dan indikator

Variabel penelitian ini meliputi (i) keselarasan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI dan (ii) kerjasama SMK dengan DU/DI dalam upaya meningkatkan kompetensi pendidik dan lulusan SMK. Adapun indikator kesesuaian kurikulum meliputi kesesuaian dalam jenis kompetensi dan kedalaman tingkat kompetensi berbasis KKNI, pembelajaran (perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar). Indikator kerjasama meliputi kerjasama antara SMK dengan Institusi Pasangan (DU/DI), SMK dengan pemerintah daerah provinsi, SMK dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dalam hal perencanaan pembelajaran, penyediaan *input* pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan penempatan lulusan. Data yang diperlukan mencakup data primer dan data sekunder dari berbagai instansi terkait. Indikator dimaksud mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan SMK

kompetensi keahlian yang diteliti, yaitu: 1) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; dan 2) Agroindustri.

C. Prosedur

1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi seluruh SMK yang menyelenggarakan Kompetensi Keahlian APHP dan Kompetensi Keahlian Agroindustri di Indonesia. SMK yang menjadi sampel penelitian ini yaitu SMK Negeri yang menyelenggarakan Kompetensi Keahlian APHP dan Kompetensi Keahlian Agroindustri di empat kabupaten dan satu kota (Tabel 5).

Teknik pemilihan kompetensi keahlian sampel menggunakan *purposive sampling* (sampling bertujuan) dengan pertimbangan 1) Masing-masing SMKN Sampel terpilih merupakan SMK dalam kategori baik dan menggunakan spektrum kompetensi keahlian yang sama yaitu APHP (Per.Ditjen Dikdasmen No 06/D-D5/Kep/2018), dan 2) Memiliki mitra kerja (institusi pasangan) dengan DU/DI yang memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan praktik kerja industri bagi siswa.

Tabel 5. Sekolah Sampel Studi

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1	SMKN PP Tanjungsari	Kab.Sumedang, Jabar
2	SMKN 1 Temanggung	Kab. Temanggung, Jateng
3	SMKN 5 Jember	Kab. Jember, Jatim
4	SMKN PP Banjarbaru	Kab. Banjarbaru, Kalsel
5	SMKN Terpadu Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Pekanbaru

2. Responden

Responden penelitian meliputi wakasek bidang humas, wakasek kurikulum, guru produktif (kelompok mata pelajaran peminatan kejuruan), pembimbing prakerin/ PKL, dan instruktur/pembimbing prakerin/PKL di DU/DI, serta disnaker setempat.

3. Instrumen, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Instrumen penelitian berupa pedoman diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang mencakup seperangkat pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum SMK Pertanian khususnya kelompok mata pelajaran produktif bidang Agribisnis dan Agroteknologi dan keselarasan kedalaman materi dengan jenis kompetensi Skema Sertifikasi KKKNI Level II dan implementasinya dalam RPP pembelajaran dan prakerin di DU/DI.

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui metode studi dokumen dari berbagai sumber baik berupa dokumen-dokumen internal/eksternal dunia usaha/dunia industri (DUDI), peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan hasil studi, data statistik pendidikan khususnya SMK Pertanian, dan studi pustaka. Hasil analisis data sekunder tersebut diverifikasi di empat kabupaten dan satu kota sesuai dengan jumlah sampel penelitian. Verifikasi ini dilakukan dengan cara diskusi kelompok terpumpun (DKT). Hasil DKT tersebut menjadi data primer penelitian.

Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan cara menginventarisasi, mengelompokkan data, mengklasifikasi, dan menarik kesimpulan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelarasan Kurikulum

Bagian ini akan membahas pengadopsian skema sertifikasi KKKNI dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 17 unit kompetensi Umum/Inti, dan 13 unit kompetensi pilihan yang terdapat dalam Skema Sertifikasi KKKNI level II untuk Kompetensi Keahlian APHP (Tabel 6) telah diadopsi ke dalam Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Kompetensi Keahlian APHP.

Tabel 6. Skema Sertifikasi KKKNI Level II pada Kompetensi Keahlian APHP

KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	THP.OO01.006.01	Mengikuti Prosedur kerja menjaga praktik pengolahan yang baik (GMP)
2.	THP.OO01.007.01	Mengikuti Prosedur Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
3.	THP.OO01.009.01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Mutu
4.	THP.OO01.012.01	Membersihkan dan Sanitasi Peralatan
5.	THP.FS02.016.01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Keamanan Pangan
6.	THP.ID02.018.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Curai
7.	THP.ID02.020.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Sayuran Segar
8.	THP.ID02.022.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Buah Segar

KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
9.	THP.ID02.023.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Hasil Ternak
10.	THP.HD02.029.01	Memilah dan Membersihkan
11.	THP.DR02.032.01	Mengoperasikan Proses Pengeringan
12.	THP.PK02.046.01	Mengoperasikan Proses Pengemasan
13.	THP.ST02.051.01	Mengoperasikan Proses Penyimpanan
14.	THP.ZR02.059.01	Melakukan Proses Pemotongan
15.	THP.ZR02.063.01	Mengoperasikan Proses Grinding
16.	THP.EX02.064.01	Melakukan Proses Ekstraksi Padat-Cair
17.	THP.FT02.069.01	Mengoperasikan Proses Fermentasi
18.	THP.OO03.08101	Melakukan Proses Pencampuran Bahan Adonan
19.	THP.OO03.082.01	Mengoperasikan Proses Pembentukan Adonan
20.	THP.OO03.083.01	Melakukan Proses Pengembangan Akhir dan Pemanggangan Roti
21.	THP.OO03.084.01	Melakukan Proses Produksi Roti
22.	THP.OO03.087.01	Melakukan Proses Membuat Susu Kedelai
23.	THP.OO03.088.01	Memproduksi Nata de Coco
24.	THP.OO03.090.01	Memproduksi Asinan Sayuran
25.	THP.OO03.092.01	Melakukan produksi telur asin
26.	THP.OO03.095.01	Memproduksi Selai Buah (Jam)
27.	THP.OO03.096.01	Melakukan Proses Penghancuran
28.	THP.OO03.097.01	Melakukan Proses Produksi Tepung
29.	THP.OO03.100.01	Membuat Laporan Teknis dan Keuangan Bisnis Mandiri

Sumber: BNSP, 2017

Pengadopsian tiga puluh unit kompetensi umum/inti dan pilihan tersebut tersebar pada berbagai KI-KD dari setiap mata pelajaran kelompok C2 (Dasar Program Keahlian), dan mata pelajaran kelompok C3 (Kompetensi Keahlian). Dengan

mencermati hasil pemetaan sebaran pengadopsian tersebut (Tabel 7), dapat dinyatakan bahwa Kurikulum yang digunakan pada Kompetensi Keahlian APHP telah mengacu kepada Skema Sertifikasi KKNI, dalam hal ini adalah Skema Sertifikasi KKNI level II untuk Kompetensi Keahlian APHP. Hasil analisis konten KI-KD dari setiap mata pelajaran yang menjadi dasar pemetaan pengadopsian dapat dilihat pada Tabel-Tabel Lampiran 1, 2, dan 3. Dalam konteks kesesuaian, dapat dikatakan Kurikulum yang digunakan pada Kompetensi Keahlian APHP telah sesuai dengan kebutuhan DU/DI.

Setelah pengadopsian Skema Sertifikasi KKNI ke dalam Kurikulum, langkah berikutnya dalam konteks kesesuaian adalah menuangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut dapat dicermati pada RPP dan Silabus yang disusun dan digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik teori/pengetahuan (KI-3) maupun praktik/keterampilan (KI-4) untuk setiap mata pelajaran pada kelompok C2 (Dasar Program Keahlian) dan kelompok C3 (Kompetensi Keahlian). Hasil analisis konten terhadap beberapa sampel RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktek dari mata pelajaran tersebut di setiap sekolah sampel mendapatkan bahwa unit-unit kompetensi dalam SKKNI telah dituangkan dalam RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktik. Contoh-contoh RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktik yang mencantumkan unit-unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi KKNI level II pada Kompetensi Keahlian APHP ditunjukkan pada Tabel Lampiran 4, 5, 6, dan 7.

Dari sudut pandang yang berbeda, dalam hal struktur kurikulum, ditemukan hampir semua sekolah sampel tidak dapat melaksanakan (mengaplikasikan) pembelajaran untuk

seluruh KI-KD yang tertuang dalam Kurikulum. Hal ini terjadi pada mata pelajaran Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal. Dalam struktur KI-KD mata pelajaran tersebut, KI-KD yang terkait dengan pembelajaran kompetensi keterampilan (KI-4) pengolahan komoditas hasil tanaman keras (kelapa, kelapa sawit, karet) tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya adalah tidak terdapat industri/pabrik yang mengolah komoditas hasil tanaman-tanaman keras tersebut di daerah ataupun wilayah sekitar sekolah. Dengan demikian sekolah tidak bisa mendapatkan DU/DI untuk dijadikan mitra pendukung keterlaksanaan pembelajaran, baik untuk pembelajaran praktik dasar maupun untuk tahapan prakerin bagi siswa.

Meskipun tidak memerlukan adanya penambahan KI-KD dalam struktur Kurikulumnya, penelitian ini mendapatkan beberapa KI-KD yang kedalaman atau deskripsi, dan jumlah jam tatap muka pembelajarannya akan menghasilkan kompetensi lulusan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan DU/DI. Merujuk kepada deskripsi KI-KD pada mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati yang terkait dengan pengetahuan (KI-3) tentang identifikasi umbi-umbian, buah dan sayuran segar untuk satuan produksi, siswa hanya diarahkan memiliki kompetensi keterampilan (KI-4) mampu menunjukkan umbi-umbian, buah dan sayuran segar untuk satuan produksi. Hal tersebut dianggap masih kurang apabila hanya dapat menunjukan saja. Seharusnya dalam hal ini deskripsi KI-KD secara eksplisit menyatakan siswa juga harus memiliki kompetensi mampu menganalisis, membuat kriteria, menerapkan dan mengevaluasi kondisi/kualitas komoditas umbi-umbian, buah, dan sayuran.

Tabel 7. Adopsi Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian APHP dan Agroindustri

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
1	THP.O O01.0 06.01	Mengikuti Prosedur kerja menjaga praktik pengolahan yang baik (GMP)	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 11	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 11
2	THP.O O01.0 07.01	Mengikuti Prosedur Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 3 dan 6	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 2 dan 6
3	THP.O O01.0 09.01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Mutu	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 3 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 1 dan 11 Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan, KI 1, 2 dan 5	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 3 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 1 dan 11 Produksi Hasil Nabati, KI 4, 20, dan 21 Produksi Hasil Hewani, KI 4, 21 dan 22 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 15 dan 16 Keamanan Pangan dan Sistem Jaminan Mutu, KI 1, 2, 31, 32, dan 34

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
4	THP.O O01.0 12.01	Membersihkan dan Sanitasi Peralatan	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 8 dan 10 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 6	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 8 dan 10 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 6 Produksi Hasil Nabati, KI 4 Produksi Hasil Hewani, KI 4
5	THP.F S02.01 6.01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Keamanan Pangan	Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan KI 1, 3, 4, dan 5	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 12 Produksi Hasil Nabati, KI 5, 20, dan 21 Produksi Hasil Hewani, KI 5, 21, dan 22 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 15 dan 16 Keamanan Pangan dan Sistem Jaminan Mutu, KI 1, 2, 31, 32, 34, 35, dan 36
6	THP.I D02.0 18.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Curai	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
			Hasil Nabati, KI 17 dan 21	Produksi Hasil Nabati, KI 5,9, dan 10 Produksi Hasil Hewani, KI 9
7	THP.I D02.0 20.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Sayuran Segar	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 6	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 7
8	THP.I D02.0 22.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Buah Segar	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 2	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Hasil Nabati, KI 6
9	THP.I D02.0 23.01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Hasil Ternak	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 1	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 6
10	THP.H D02.0 29.01	Memilah dan Membersihkan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 6	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 7 Penyimpanan dan Penggudangan, KI 22

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
11	THP.D R02.03 2.01	Mengoperasikan Proses Pengeringan	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 3	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 3 Penyimpanan dan Penggudangan, KI 22
12	THP.P K02.0 46.01	Mengoperasikan Proses Pengemasan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 8 Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 9 Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 7	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 8 Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 9 Produksi Hasil Nabati, KI 26 Produksi Hasil Hewani, KI 27 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 21 Produk Kreatif dan Kewirausahaan, KI 4
13	THP.S T02.05 1.01	Mengoperasikan Proses Penyimpanan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 9 dan 10 Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan,	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 9 dan 10 Penyimpanan dan Penggudangan, KI 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 18

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
			KI 6, 7, 10, 13, dan 14	
14	THP.Z R02.05 9.01	Melakukan Proses Pemotongan	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 4, 15, dan 23	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1
15	THP.Z R02.06 3.01	Mengoperasikan Proses Grinding	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 19 dan 23	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1
16	THP.E X02.0 64.01	Melakukan Proses Ekstraksi Padat-Cair	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1
17	THP.F T02.06 9.01	Mengoperasikan Proses Fermentasi	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 7 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 8	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 7
18	THP.O O03.0 81.01	Melakukan Proses Pencampuran Bahan Adonan	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
19	THP.O O03.0 82.01	Mengoperasikan Proses Pembentukan Adonan	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
20	THP.O O03.0 83.01	Melakukan Proses Pengembangan Akhir dan Pemanggangan Roti	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 5 dan 6

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
21	THP.O O03.0 84.01	Melakukan Proses Produksi Roti	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
22	THP.O O03.0 87.01	Melakukan Proses Membuat Susu Kedelai	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 24	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
23	THP.O O03.0 88.01	Memproduksi Nata de Coco	Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 3	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
24	THP.O O03.0 90.01	Memproduksi Asinan Sayuran	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 9	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
25	THP.O O03.0 92.01	Melakukan produksi telur asin	Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 3, 6	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 7
26	THP.O O03.0 95.01	Memproduksi Selai Buah (Jam)	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 5	Produksi Hasil Nabati, KI 6
27	THP.O O03.0 96.01	Melakukan Proses Penghancuran	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20, 24	Produksi Hasil Hewani, KI 8 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 5 dan 7
28	THP.O O03.0 97.01	Melakukan Proses Produksi Tepung	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 16, 20	Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 5
29	THP.O O03.1 00.01	Membuat Laporan Teknis	Produk Kreatif dan	Produksi Hasil Nabati, KI 29

Kompetensi Umum dan Inti			Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
No	Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGRO INDUSTRI
		dan Keuangan Bisnis Mandiri	Kewirausahaan, KI 20	Produksi Hasil Hewani, KI 30 Produksi Komoditas Perkebun-an dan Herbal, KI 23 Produk Kreatif dan Kewira- usahaan, KI 20, 22, 24, dan 27

Dalam struktur Kurikulum terlihat untuk ketiga mata pelajaran yang termasuk kedalam kelompok C2 (dasar program keahlian) masing-masing dialokasikan 3 jam/minggu untuk mata pelajaran Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, 5 jam/minggu untuk mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, dan 4 jam/minggu untuk mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil pertanian. Jumlah tatap muka pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran C2 yang keseluruhan hanya dialokasikan 12 jam per minggu (@ 45 menit) oleh kalangan sekolah dinyatakan kurang. Sebab, untuk keperluan persiapan mengikuti prakerin di perusahaan saja, penguasaan kompetensi-kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran kelompok C2 ini menjadi semacam prasyarat pertama. Hal ini dikarenakan pada masa awal prakerin siswa tidak akan melakukan praktik langsung di bagian produksi/pengolahan, tetapi diawali dengan praktik penanganan bahan berupa pengamatan/pemeriksaan mutu bahan sambil melakukan observasi proses produksi/pengolahan bahan. Menurut kalangan DU/DI demikian juga yang terjadi ketika

lulusan direkrut oleh perusahaan, masa-masa pertama kali bekerja akan ditempatkan di bagian penanganan bahan terlebih dahulu. Pada prinsipnya hal tersebut untuk menghindari atau meminimalisir resiko terjadinya kesalahan dalam proses produksi.

Kalangan DU/DI berpendapat bahwa tuntutan konsumen (pasar) saat ini sudah melampaui kemampuan industri, di mana mereka menginginkan adanya kepraktisan namun tetap mengedepankan keamanan dalam menggunakan/mengonsumsi produk. Berdasarkan perkembangan kondisi inilah, DU/DI menyatakan penguasaan kompetensi dalam hal keamanan pangan perlu ditambah lebih mendalam. Terkait dengan hal tersebut, sesuai perkembangan yang dihadapi oleh DU/DI belakangan ini, pengetahuan-pengetahuan terkini tentang standar-standar kinerja yang saat ini digunakan/diacu oleh DU/D, seperti HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) dan ISO 22000 beserta turunannya untuk berbagai jenis pangan harus diajarkan kepada siswa.

Penguasaan atau kemampuan kerja siswa dan lulusan di laboratorium, seperti teknik pengkalibrasian dan penggunaan peralatan pengujian mutu bahan, masih sangat kurang. Untuk penggunaan alat sederhana siswa memang sudah banyak yang memahami, akan tetapi untuk peralatan yang modern belum terbiasa dan masih harus banyak belajar. Perkembangan terkini dalam proses produksi di DU/DI sudah semakin banyak memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya di bidang Teknologi Informatika (TI). Dapat dikatakan semua sistem kerja yang ada di DU/DI sudah terkomputerisasi, bahkan peralatan laboratorium yang digunakan DU/DI umumnya juga sudah menggunakan teknologi komputer/digital. Oleh karena

itu diperlukan penguatan kompetensi lulusan SMK APHP dalam hal Teknologi Informatika (TI), apalagi jika mengingat hampir semua SMK masih menggunakan teknik (cara) dan peralatan manual dalam pembelajaran praktiknya.

Selain untuk kompetensi *hard skills* sebagaimana tersebut di atas, siswa juga perlu diberikan beberapa *soft skills* sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di DU/DI saat ini. Pemahaman tentang manajemen manufaktur dari hulu ke hilir saat ini semakin menjadi tuntutan bagi SDM di DU/DI. Dampak kemajuan (lompatan) teknologi informatika saat ini mengakibatkan di satu sisi DU/DI harus dijalankan oleh organisasi SDM yang semakin ramping, tetapi di sisi lain masing-masing individu SDM tersebut juga dituntut minimal harus memahami kompetensi-kompetensi lain yang terkait dengan kompetensi pokok/utama yang benar-benar dikuasainya. Kondisi ini akan tampak jelas pada DU/DI yang tergolong ke dalam skala UKM, dimana operasional perusahaan ditangani oleh SDM yang terbatas. Sehingga masing-masing dituntut tidak hanya menguasai kompetensi yang menjadi spesialisasinya saja, tetapi juga kompetensi-kompetensi lain terkait yang dibutuhkan untuk berjalan lancarnya operasional perusahaan. Selain itu *soft skill* lain dalam hal kemampuan komunikasi (termasuk dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya) dan *leadership* (tanggung jawab, disiplin waktu, dan tangguh/gigih dalam bekerja) juga perlu diajarkan, karena lulusan juga memiliki peluang untuk berkarir menjadi pimpinan di perusahaan.

B. Mekanisme Penyelarasan Kurikulum

Kegiatan penyelarasan kurikulum dengan mitra DU/DI, biasa disebut sinkronisasi, dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu menjelang tahun ajaran baru dan menjelang ulangan kenaikan kelas. Pada prinsipnya pihak mitra DU/DI diminta untuk menyampaikan kompetensi-kompetensi terbaru apa saja yang mereka butuhkan dari calon karyawan. Mekanismenya adalah pihak DU/DI diberi formulir isian tentang daftar kompetensi terbaru yang mereka butuhkan. Setelah itu diadakan pertemuan dengan mengundang pula pihak Komite Sekolah untuk mengadakan sinkronisasi antara kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI, dengan arah/program pengembangan atau penyesuaian kurikulum sekolah. Hasil sinkronisasi terutama akan digunakan sebagai bahan untuk pengayaan/pengembangan kurikulum, dan mempersiapkan siswa yang akan melaksanakan prakerin. Selain melalui kegiatan sinkronisasi, upaya penyelarasan kurikulum juga dilakukan dalam kesempatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan mitra DU/DI terhadap program prakerin yang berlangsung di masing-masing perusahaan. Dari hasil monev tersebut seringkali diperoleh masukan (*feedback*) untuk pengayaan/pengembangan kurikulum.

Penyelarasan kurikulum melalui kegiatan monev prakerin hanya melibatkan DU/DI mitra sekolah. Sedangkan pada penyelarasan kurikulum melalui kegiatan sinkronisasi, selain melibatkan mitra DU/DI dan Komite Sekolah, pada sekolah-sekolah (SMK) yang sudah lama berdiri (beroperasi) dilibatkan juga ikatan alumni. Ikatan alumni tersebut tersebar berkarir di berbagai perusahaan mulai skala lokal, nasional, hingga multinasional, atau tidak sedikit juga yang berwirausaha bahkan

sukses menjadi pemilik perusahaan. Dalam kasus seperti ini ikatan alumni tidak saja berperan dalam kegiatan penyaluran kurikulum, tetapi juga berkontribusi sangat besar bahkan menjadi bagian/komponen penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Bentuk-bentuk kontribusi dari ikatan alumni tersebut mulai dari fasilitasi kunjungan industri, prakerin, penugasan ahli/praktisi industri sebagai guru tamu (termasuk sebagai mentor/pengajar/instruktur dalam kegiatan ekstrakurikuler), pelatihan dan pemagangan guru di industri, pemberian bantuan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran, pemberian beasiswa, hingga perekrutan lulusan.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Penyelarasan Kurikulum
 - a. Kurikulum dan pelaksanaan kurikulum (penyusunan RPP, Silabus, dan pelaksanaan pembelajaran) pada Kompetensi Keahlian APHP dan Kompetensi Keahlian Agroindustri telah mengacu kepada Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian APHP, yang telah disahkan bersama oleh BNSP dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Dalam rangka penyelarasan dengan kebutuhan DU/DI, tidak perlu melakukan penambahan mata pelajaran atau bahkan penambahan unit KI/KD dalam kurikulum. Namun demikian, ditemukan hal-hal berikut:
 - 1) Materi pengetahuan (KI-3) pada mata pelajaran Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan, khususnya yang terkait standar-standar keamanan pangan, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang dihadapi oleh DU/DI.
 - 2) Kedalaman kompetensi keterampilan yang diajarkan pada KI-4 mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati, dalam hal ini kompetensi menunjukkan kesegaran berbagai komoditas hasil pertanian sebagai bahan baku produksi, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan DU/DI. Keterampilan yang dituntut DU/DI saat ini tidak hanya sekedar menunjukkan saja, tetapi juga

- mampu mengevaluasi, menyusun kriteria, dan mengklasifikasi tingkat kesegaran bahan baku.
- 3) Kurangnya jumlah jam tatap muka untuk pembelajaran semua mata pelajaran yang termasuk ke dalam kelompok Dasar Program Keahlian (C2).
 - 4) *Soft skills* lulusan SMK dalam hal kemampuan komunikasi dan *leadership* pada umumnya lemah.
 - 5) Belum semua SMK penyelenggara Kompetensi Keahlian APHP menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai/selaras dengan kebutuhan DU/DI, dikarenakan hal-hal berikut: a) Kekurangan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran, terutama untuk pembelajaran praktik; b) Keterbatasan guru, dalam hal ini guru mata pelajaran kelompok C3, baik jumlah maupun kompetensinya; c) Kesulitan mendapatkan mitra DU/DI, khususnya bagi SMK/KK yang belum lama berdiri/diselenggarakan; dan d) Belum memiliki TUK atau terlisensi sebagai LSP-P1 oleh BNSP, atau setidaknya kesulitan melakukan uji kompetensi/sertifikasi bagi lulusannya.
 - 6) Penyesuaian/penyelarasan kurikulum dilakukan dengan melibatkan mitra DU/DI, Komite Sekolah, dan Ikatan Alumni, dan dilakukan pada saat kegiatan sinkronisasi menjelang kenaikan kelas dan menjelang tahun ajaran baru, dan monitoring dan evaluasi bersama dengan mitra DU/DI terhadap program prakerin.

2. Pola Mekanisme Penyelarasan Kurikulum

Belum ada aturan maupun rambu-rambu secara legal formal terkait pola mekanisme penyelarasan kurikulum SMK yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari DU/DI, Asosiasi profesi, Kadin, BNSP, dan pihak Kemendikbud. Namun demikian telah ada jalur alumni SMK sampel yang telah melakukan *sharing* informasi setiap kali melakukan pertemuan dengan sekolah untuk menyampaikan hal-hal terkait kemajuan bidang iptek di industri yang dianggap perlu untuk diketahui dan direspon sekolah sehingga tidak terjadi *gap* kemajuan di industri dengan kesiapan sekolah mengikuti tren perkembangan industri.

B. Rekomendasi

Dalam rangka penyesuaian/penyelarasan kompetensi lulusan SMK APHP dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI di bidang pengolahan hasil pertanian, berdasarkan temuan penelitian disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan berikut:

1. Penyelarasan Kurikulum

Rekomendasi disampaikan kepada instansi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pusat Kurikulum dan Direktorat Pembinaan SMK (Dit. PSMK) agar melakukan:

- 1) Pembaharuan/*updating* materi pengetahuan (KI-3) pada mata pelajaran Keamanan Pangan dan Penyimpanan dan

- Penggodongan yang disesuaikan dengan perkembangan yang dihadapi oleh DU/DI;
- 2) Pendalaman/peleluasan kompetensi keterampilan pada KI-4 mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati, dalam hal ini kompetensi menunjukkan kesegaran berbagai komoditas hasil pertanian, disesuaikan dengan tuntutan DU/DI;
 - 3) Melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan menyusun draf kerjasama “Mekanisme Penyelarasan Kurikulum SMK” dengan para pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya;
 - 4) Penambahan jumlah jam tatap muka untuk semua mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok Dasar Program Keahlian (C2) dan/atau guru mengaturnya dengan cara penambahan jam pelajaran di luar kegiatan intra kurikuler;
 - 5) Penambahan kumulatif masa pelaksanaan Prakerin di DU/DI dari 3 bulan menjadi 6 bulan, untuk SMK dengan masa studi 3 tahun, agar wawasan/ pengalaman industri dan kompetensi lulusan menjadi lebih mendalam;
 - 6) Merevisi/menyesuaikan format penilaian dan evaluasi Prakerin versi sekolah agar *match* (sesuai) dengan format penilaian yang sudah baku/standar dari DU/DI; dan
 - 7) Meningkatkan peran (pendampingan, bimbingan, dan fasilitasi) institusi pembina sekolah baik di Pusat (Direktorat Pembinaan SMK) maupun Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi), untuk meningkatkan kapasitas sekolah agar mampu secepat mungkin membangun TUK dan mendapatkan lisensi sebagai LSP-P1 dari BNSP, untuk meningkatkan akses sertifikasi lulusan.

b. Sekolah (SMK)

- 1) mempersiapkan berbagai perangkat untuk membangun TUK dan mendapatkan lisensi sebagai LSP-P1 dari BNSP, untuk meningkatkan akses sertifikasi lulusan,
- 2) mendayagunakan ikatan alumni untuk ikut memperkuat kegiatan/proses pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan DU/DI, dengan memberikan kemudahan akses bagi siswa untuk melakukan Prakerin, guru untuk magang di industri, dan praktisi/tenaga ahli di industri sebagai guru tamu,
- 3) menjalin koordinasi dan kerjasama dengan
 - (i) KADINDA (Kamar Dagang dan Industri Daerah) bidang agribisnis, pangan, dan kehutanan, sebagai wadah/representasi para pelaku usaha dan industri (DU/DI) di masing-masing daerah, dan
 - (ii) BPPSDM Pertanian (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) Kementerian Pertanian, untuk 1) melibatkan dalam kegiatan-kegiatan penyesuaian/ penyelarasan Kurikulum, 2) meningkatkan akses sertifikasi lulusan, 3) meningkatkan bimbingan bagi sekolah, 4) memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan Prakerin siswa, magang bagi guru, dan menyediakan guru/instruktur tamu dari praktisi/ahli di DU/DI, dan 5) melakukan penguatan kompetensi *soft skills* siswa dalam hal kemampuan berkomunikasi dan *leadership* (disiplin kerja, tanggung jawab, dan budaya/etika kerja).

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin & M. Najib. 2013. Relationship of job involvements on vocational school students' job satisfactions in industrial training. *International Journal of Vocational and Technical Education*. Malaysia: Academic Journals Vol.5(1). hal 1-7
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Tingkat Pengangguran Agustus 2013*, (Online), (http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&i_d_subyek=06), diakses tanggal 31 Maret 2018
- Badan Pusat Statistik 2014. Persentase Penduduk Usia ≥ 15 Tahun yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Data November 2013, Mei dan November 2014 dan 2015
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2017. Skema Sertifikasi KKKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. BNSP. Jakarta
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2016a. Paparan Kepala Sub. Direktorat P2SMK: *Keselaran Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Dunia Kerja* Jakarta: Dikmenjnr
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2016b. *Pedoman Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Dikmenjnr.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas

- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2015. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian
- Djojonegoro, Wardiman. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.
- Effendi, Muhajir 2016. SMK Bisa Hebat, edisi ke-II 2016
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/09/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-tentang-revitalisasi-smk>
 (http://www.itb. ac.id/news/ 4425.xhtml).
- http://penyelarasan.kemdiknas.go.id/uploads/file/Materi.Sosialisasi. enyelarasan.pdf
- Hamalik, Oemar. 2007. *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia.
- Jalal, Fasli. 2015. Bonus Demografi: Berkah atau Bencana, Makalah disampaikan pada Dialog Bonus Demografi, DDI, Jakarta2 Septmber 2015
- Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi Republik. 2016. *Bahasa Indonesia: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*

- Komalasari, Kokom. 2013. *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyadi. Ade. 2014. *Efektivitas praktik kerja industri sesuai dengan tuntutan dunia kerja*, Skripsi, (tidak dipublikasikan) Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Fakultas Teknik, UNY
- Mulyasa. 2005. *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Notodihardjo, Hardjono. 1990. *Pendidikan Tinggi Dan Tenaga Kerja Tingkat Tinggi di Indonesia*; UI- Press, 1990, Jakarta
- Nurchayono. 2015 Praktek Kerja Industri (Prakerin) dan Kontribusinya Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMK Negeri I Pati dalam e-Economic Education Analysis Journal ISSN -2251-6544
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi dalam www.kemenakertrans.go.id, dikutip 04 April 2018
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

- Peraturan Direktorat Jenderal Dikdasmen telah menerbitkan Peraturan No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK,
- Robins. Sthepen. 2003. *Strategic Management: Strategy Formulation and Implementation*; Richard D. Irwin, USA
- Suryadi, A. 2010. Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan. Studi Relevansi pendidikan Kerjasama UPI dengan Balitbang Kemendiknas, 2010. Jakarta
- Slamet PH. 2013. Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK teradap Pembangunan Ekonomi Indonesia” dalam Cakrawala Pendidikan, UNY: *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, hlm301-331.
- Stevenson. J. (ed). 2003. *Developing Vocational Expertise. Principles and issues in vocational education*. Allen & Unwin 83 Alexander Street Crows Nest 2065 Australia.
- Spencer, L. M and Spencer, S. M. 1993. *Competence at Work*. John Wiley & Son. Canada
- Surya, Mohamad. 2004. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung: Pustaka Bani uraisy
- Sashkin, Marshal dan Kisser. 1993. *Putting Total Quality Management to Work*, (San Francisco: Berret – Kohler Publisher, 1993), hal. 75
- Teck Heang Lee dkk. 2012. “Perceived Job Readiness of Business Students at the Institutes of Higher Learning in Malaysia”. *International Journal of Advances in*

Management and Economics. Malaysia: Issue 6 Vol.1.
p.151.

Yuli. 2012. “Evaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Siswa SMK Kompetensi Keahlian Penyuluhan Pertanian di Kalimantan Selatan”. Skripsi, Yogyakarta: UNY.

Laporan hasil penelitian berjudul Kesesuaian Kurikulum SMK dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja (Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) ini disusun dalam rangka menyusun usulan kebijakan terkait kesesuaian kurikulum SMK Pertanian bidang Agribisnis/Argoteknologi, Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat kebijakan terkait Revitalisasi SMK sesuai dengan Nawacita dan arahan serta instruksi Presiden Jokowi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum dan pelaksanaan kurikulum (penyusunan RPP, Silabus, dan pelaksanaan pembelajaran) pada Kompetensi Keahlian APHP dan Kompetensi Keahlian Agroindustri telah mengacu kepada Skema Sertifikasi KKNI Level II, yang telah disahkan bersama oleh BNSP dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, masih ditemukan materi dan kompetensi yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan di industri dan kurangnya pembekalan yang harus dialami siswa untuk persiapan terjun ke industri. Penyelarasan kurikulum, baik terkait Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti perlu terus dilakukan dan diperdalam dengan melibatkan pihak sekolah, pihak industri, dan juga pengambil kebijakan termasuk Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud, Lembaga Sertifikasi, dan institusi/lembaga terkait lainnya.

